

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

Untuk mencapai tujuan korporasi, struktur, proses dan aturan yang dapat disebut Sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur interaksi antara *stakeholder*, khususnya yang melibatkan *shareholder*, dewan direksi dan komisaris (Hapsari, 2019). Menurut (IAI, 2015) GCG memiliki lima prinsip untuk diterapkan oleh perusahaan. Lima prinsip tersebut, adalah:

a. **Transparansi**

Dalam melaksanakan bisnis yang baik korporasi harus memberikan fakta yang relevan, material, mudah diakses dan mudah di pahami pemangku kepentingan. Informasi yang disediakan bukan saja tentang kesulitan yang ditentukan oleh UU tetapi penting untuk proses pembuatan keputusan bagi *stakeholder*.

b. **Akuntabilitas**

Korporasi mampu mempertanggungjawab data dan kinerja dengan cara adil serta transparan. Oleh karena itu, korporasi dijalankan dengan cara efektif dan sesuai dengan tujuannya, termasuk mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Baik dewan komisaris yang mengawasi dewan direksi maupun dewan direksi yang mengelola perusahaan harus bertanggung jawab untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. **Responsibilitas**

Untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, korporasi menaati persyaratan peraturan dan terpenuhi komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat.

d. **Independensi**

Perusahaan harus dikelola dengan independensi supaya tidak mendominasi dan tidak ikut campur terhadap kepentingan tertentu yang bukan kewajibannya.

e. **Kewajaran dan Kesetaraan**

Setiap pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara oleh perusahaan, dengan mempertimbangkan kontribusi dan keuntungan mereka. Berdasarkan posisi masing-masing, korporasi memberikan peluang kepada *stakeholder* untuk menyapaikan umpan balik serta klarifikasi atas informasi dengan menggunakan prinsip transparansi.

Perusahaan perlu menetapkan tujuan yang jelas. Keuntungan maksimum adalah tujuan pertama, kesejahteraan pemegang saham yaitu tujuan kedua, meningkatkan kualitas korporasi, sebagaimana diwakili oleh harga saham, yaitu tujuan ketiga. Tingginya harga saham mengindikasikan nilai perusahaan yang baik.

2.1.1 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Adapun mekanisme GCG, antara lain:

- a. Hak Kepemilikan Saham (*Shareholder Rights*)
Pemodal memiliki hak istimewa terhadap korporasi menurut peraturan UU dan regulasi korporasi. Hak dan kewajiban pemegang saham antara lain menghadiri RUPS. Dalam hal *shareholder* yang hadir, perusahaan wajib mengumumkan calon direktur dengan menggunakan hak suara kumulatif.
- b. Dewan Direksi (*Board of Directors*)
Dewan direksi harus mengikuti rapat minimal 75% dan melakukan rapat empat pertemuan rapat rutin untuk dewan direksi pertahunnya. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan tahunannya jika ada peraturan untuk mengatur pertemuan dewan.
- c. Komisaris Independen (*Outside Directors*)
Komisaris Independen ditunjuk Sebagai memantau secara mandiri kegiatan direksi guna mengurangi konflik kelembagaan dan meningkatkan kinerja. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, manajemen, ekuitas, atau keluarga dengan komisaris lainnya.
- d. Dewan Audit dan Internal Audit (*Audit Committee and Internal Auditor*)
Dewan Pengawas membentuk dewan audit untuk menolong pengawasan dalam melaksanakan tanggung jawab. Dewan audit berkewajiban terhadap pengawas serta Audit Internal untuk Direksi. Dewan Audit menyelenggarakan dua kali atau lebih rapat per tahun dengan tingkat kehadiran 75%. Laporan kegiatan Komite Audit/Audit Internal disusun dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Pengungkapan untuk investor (*Disclosure to Investors*)
Korporasi diwajibkan oleh hukum untuk mengemukakan informasi relevan. Pengungkapan informasi kepada investor dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap kebijakan investasi yang diambil.

2.1.2 Scoring *Good Corporate Governance*

Corporate Governance Index (CGI) alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang unggul dalam suatu korporasi. CGI adalah *index* yang menerapkan prinsi-prinsip GCG untuk mengukur berbagai aspek termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran & kesetaraan.

CGI menilai kualiitas GCG untuk memberikan informasi kuantitatif untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan, membantu manajemen dan pemangku kepentingan memahami seberapa baik perusahaan dikelola. Mengidentifikasi mekanisme GCG mendorong korporasi dalam meningkatkan praktik GCG dan korporasi yang meningkatkan mutu korporasi yang lebih cenderung dipercaya oleh investor.

CGI digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme GCG perusahaan apakah perusahaan menerapkan praktik GCG didalam perusahaan dengan baik atau tidak. Mekanisme GCG yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan maka di nilai 1 dan mekanisme GCG yang tidak diungkapkan di laporan keberlanjutan diberikan nilai 0.

$$CGI = A + \frac{(B+C)}{2} + D + E$$

Keterangan:

A = Hak Kepemilikan Saham (subindeks A)

B = Dewan Direksi (subindeks B)

C = Komisaris Independen (subindeks C)

D = Dewan Audit dan Internal Audit (subindeks D)

E = Pengungkapan untuk Investor (subindeks E)

Standar pengungkapan untuk setiap sub-indeks dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Subindeks *Corporate Governance Index* (CGI)

Kode	Keterangan
Subindeks A (Hak Pemegang Saham)	
A.1	Untuk memilih direksi, perusahaan menggunakan suara kumulatif atau suara mayoritas pemegang saham; keduanya adalah aturan umum dalam kode komersial.
A.2	Korporasi memberitahukan melakukan pemilihan menggunakan email.
A.3	Korporasi harus mengatur strategi rapat (tanggal dan tempat) untuk mendorong kehadiran pemegang saham.
A.4	Di pertemuan pemegang saham, perusahaan memberikan informasi calon direktur kepada <i>shareholder</i> .
A.5	Untuk transaksi tertentu dibutuhkan pengesahan dewan. Transaksi dimaksud yaitu korporasi yang tercatat dalam top 30 <i>chaebol</i> (konglomerisasi), Peraturan Monopoli dan <i>Fair Trade Act</i> memerlukan persetujuan ini (jika transaksi lebih besar dari 10% dari modal ekuitas).
Subindeks B (Dewan Direksi)	
B.1	Dewan rata-rata mengikuti pertemuan minimal 75%.
B.2	Di agenda rapat dewan, posisi direksi dicatat pada <i>boards minutes</i> .
B.3	Ketua dewan dan CEO yaitu orang yang tidak sama.
B.4	Adanya <i>boards minutes</i> untuk menilai direksi.
B.5	Terdapat syarat untuk melaksanakan rapat dewan, korporasi menyampaikan pada laporan tahunan.
B.6	Melaksanakan pertemuan rutin dewan empat atau lebih dalam setahun.
Subindeks C (Komisaris Independen)	
C.1	Perusahaan memiliki tiga puluh persen direksi dari luar.
C.2	Mempunyai satu direksi ataupun lebih dari luar negeri.
C.3	Memiliki komisaris independen.
C.4	Dewan direksi yang dari luar tidak dapat mendapatkn penghasilan pensiun.
C.5	Direktur luar menerima masukan dari pakar di luar korporasi.
C.6	<i>Shareholder</i> setuju mengkompensasi agregat direksi luar di rapat <i>shareholder</i> .
C.7	Direktur luar mengikuti rapat minimal 75%.
C.8	Adanya standar terhadap direksi luar.
C.9	Korporasi menentukan <i>contact person</i> bagi direktur independen.
C.10	Ada sebuah pertemuan dewan direktur independent
C.11	Korporasi tidak boleh meminjamkan dana kepada komisaris independen.
Subindeks D (Komite Audit dan Internal Audit)	
D.1	Perusahaan memiliki komite audit dewan direksi.
D.2	Adanya anggaran rumah tangga yang mengatur komite audit/ auditor internal.

D.3	Dewan audit memiliki kompetensi pada bidang akuntansi.
D.4	Pada RUPS, auditor internal dan komite audit merekomendasikan auditor eksternal.
D.5	Setiap pertemuan komite audit dituliskan pada <i>boards minutes</i> .
D.6	Hasil aktivitas audit komite di rapat tahunan <i>shareholder</i> .
D.7	Rata-rata kehadiran anggota komite audit mengikuti rapat minimal 75%.
D.8	Komite audit melakukan pertemuan dengan audit eksternal untuk memeriksa laporan keuangan.
Subindeks E (Pengungkapan untuk Investor)	
E.1	Kegiatan investor <i>relations</i> dilakukan oleh perusahaan setiap tahun.
E.2	<i>Resume</i> dari anggota dewan dapat ditemukan di situs web perusahaan.
E.3	Ada pengungkapan bahasa Inggris.

Sumber: *Institute Corporate Governance Indonesia*

2.2 Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Sustainability Report (Laporan Berkelanjutan) adalah informasi korporasi yang berisi pertanggung jawaban atas pengaruh perekonomian, daerah, dan masyarakat yang diakibatkan tindakan rutinitas perusahaan. Laporan ini menyampaikan nilai-nilai perusahaan dan rancangan tata kelola, dan menghubungkan antar rencana korporasi dan perjanjian terkait ekonomi dunia yang berkelanjutan (Rossi dan Panggabean, 2012).

2.2.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Dukungan sistem finansial yang mampu menghentikan praktik pendanaan ataupun investasi dalam bisnis yang memaknai sumber daya terlalu banyak, yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan merusak lingkungan. Semua ini diperlukan untuk membangun ekonomi nasional yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Berpartisipasi dalam mencapai pembangunan dan memastikan stabilitas sistem keuangan jangka panjang, prinsip berkelanjutan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, sosial dan ekologi harus diterapkan oleh sistem keuangan di tingkat pembuatan kebijakan dan keputusan bisnis. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga integritas lingkungan dan menjamin kesejahteraan, keterampilan, kemakmuran serta standar kehidupan keturunan sekarang dan masa depan.

Dalam rangka menciptakan dan menerapkan instrumen keuangan UU No.32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan melalui implementasi prinsip keuangan berkelanjutan dalam prosedur lembaga keuangan Indonesia.

Dengan menyediakan sumber pembiayaan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap masyarakat global. Otoritas Jasa Keuangan bertugas membangun kerangka regulasi dan pengawasan terpadu untuk semua kegiatan sektor jasa keuangan, sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan demikian, OJK memiliki kendali penuh atas penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pengimplementasikan keuangan berkelanjutan bertujuan untuk:

1. Menyajikan sumber dana yang cukup untuk memenuhi pendanaan terkait perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Mengelola risiko sosial dan lingkungan secara lebih efektif melalui pengembangan barang atau layanan finansial yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan daya persaingan dan ketahanan LJK, penerbit, dan perusahaan tercatat;
3. Mengurangi ketidak seimbangan sosial, mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung konservasi dan penggunaan sumber daya alam dan energi;
4. Menciptakan layanan dan/atau produk keuangan berdasarkan konsep keuangan berkelanjutan.

2.2.2 Pengukuran Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Pengungkapan laporan keberlanjutan dievaluasi dengan teknik analisis yang mengacu pada analisis isi yang mengacu pada metode *Consolidated Narrative Integration* (CONI). Berikut ini adalah metode yang digunakan CONI untuk pengungkapan lingkungan, yaitu:

- a. *Scoring*: berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada laporan keberlanjutan dan laporan tahunan, metode ini menetapkan tingkat Pengungkapan indeks kinerja lingkungan perusahaan. Pemberian skor dihitung dengan:

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = \frac{\text{jumlah item pengungkapan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor item maksimum}} \times 100\%$$

Temuan perhitungan akan dikategorikan berdasarkan tingkat pengungkapan masing-masing perusahaan, yaitu:

0%	= tidak diterapkan
1% sampai 40%	= pengungkapan terbatas
41% sampai 75%	= diterapkan sebagian
75% sampai 99%	= diterapkan dengan baik
100%	= diterapkan sepenuhnya

- b. Memeriksa analisis konten untuk setiap komponen yang dilaporkan oleh setiap perusahaan dan mengevaluasinya menurut tiga tingkat kualitas, yaitu Low Quality, Moderate Quality dan High Quality, kategori untuk mengamati ruang lingkup dan kedalaman cakupan lingkungan yang dilaporkan oleh perusahaan.

2.3 Referensi

Tabel berikut menampilkan referensi riset terdahulu untuk penulisan tugas akhir ini:

Tabel 2.2 Referensi Artikel dan Literatur

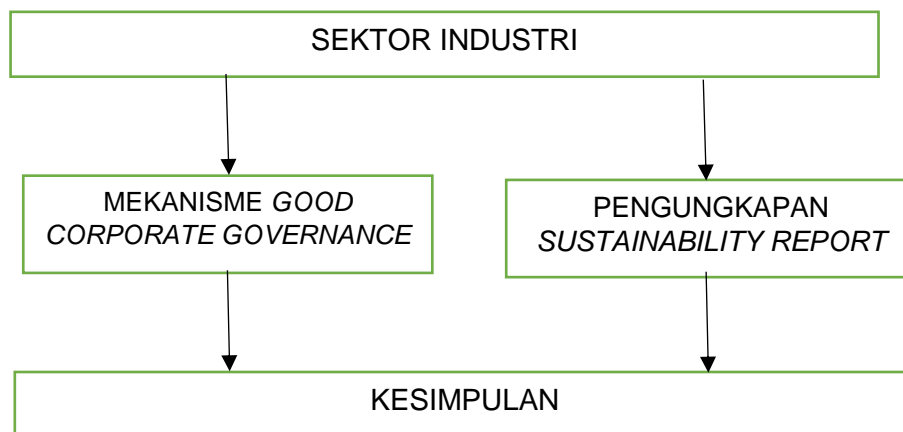
No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hapsari (2019)	Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT. NS Bluescope Indonesia	Untuk mengetahui implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan untuk mengetahui pengaruh antara prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan	Implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik/efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin baik/efektif penerapan GCG, maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik
2	Dwiardi (2021)	Analisis Aspek-Aspek Kepatuhan Penyelenggara Pos di Indonesia	Untuk menemukan aspek-aspek kepatuhan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pos dalam menjalankan bisnisnya	Indeks kepatuhan penyelenggara pos cukup memenuhi kepatuhan
3	Rossi dan Panggabean (2012)	Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan	Untuk menjelaskan hubungan antara corporate governance dengan kinerja perusahaan dan mengetahui perkembangan dan penerapan GCG di Indonesia	Hipotesis penelitian didukung yaitu bahwa corporate governance mempengaruhi kinerja operasi (ROE) perusahaan, Analisis model regresi dengan Tobin's Q sebagai variabel dependennya menunjukkan bahwa variabel corporate governance maupun variabel-variabel kontrol secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan.

4	Wibowo et al. (2010)	Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia	Untuk mendeskripsikan keuntungan menerapkan good corporate governance bagi perusahaan yang mendapatkan laba dan kepercayaan dari <i>stackholder</i> .	Secara internal penerapan GCG menjadikan suasana perusahaan menjadi kondusif karena menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagaian peran masing-masing. Secara eksternal perusahaan akan lebih dipercaya oleh <i>stackholder</i> .
5	Kurniadi dan Wardoyo (2022)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan Manufaktur dalam Perspektif Teori Agensi	Untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, jumlah komisaris dan <i>leverage</i> pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.	Penungkapan ukuran perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, jumlah komisaris dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh terhadap CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).
6	Nofianto dan Agustina (2014)	Analisis Pengaruh <i>Sustainability Report</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Untuk menguji pengaruh <i>sustainability report</i> yang dijabarkan menjadi <i>economic performance disclosure</i> , <i>environmental performanc disclosure</i> , dan <i>social performance disclosure</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan.	Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa <i>economic performance dis disclosure</i> , <i>environmental performanc disclosure</i> , dan <i>social performance disclosure</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sumber: Data Diolah Penulis

2.4 Kerangka Berpikir

Peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai panduan saat menyusun proses penelitian karena berfungsi sebagai landasan bagi desain, pemikiran, dan perencanaan mereka. Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada bagaimana perusahaan industri memengaruhi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini melaporkan laporan keberlanjutan sebagai cara untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Peneliti menggunakan fenomena ini untuk mengukur seberapa komprehensif dan luasnya pengungkapan laporan keberlanjutan. Untuk memastikan signifikansi pengungkapan laporan keberlanjutan dan pengungkapan GCG yang unggul bagi korporasi dengan pengungkapan PJOK 51, perusahaan merilis keduanya. Semakin banyak laporan keberlanjutan membahas topik GCG yang kuat dan keberlanjutan, semakin patuh korporasi tersebut, dan semakin baik reputasi korporasi tersebut dengan investor dan pemangku kepentingan.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data Diolah Penulis